



DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS

LAKIP

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025**

 dkpkab.bengkalis@gmail.com

 [dkp.kab.bengkalis](https://www.instagram.com/dkp.kab.bengkalis)

Daftar isi

Daftar Isi	
Kata Pengantar.....	1
Ringkasan Eksekutif	2
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	4
D. Struktur Organisasi.....	5
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	6
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	10
A. Pengukuran Kinerja	10
B. Analisis Kinerja.....	11
C. Realisasi Anggaran	24
D. Analisis Efisiensi	26
Bab IV Penutup	28

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2026

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkalis,**



**S'JSY HARTATI, SP.M.Si
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19751217 200604 2 001**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. Selaintugastersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Perumusan keijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tata tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 , Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator Utama untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKJ dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKPJ tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan nevaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.



C. Tugas dan Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jalan Antara Bengkalis, dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 dan dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Sebagai sebuah Instansi pemerintah, maka **tugas pokok** Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 100 Tahun 2021 adalah **Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan**. Untuk menjalankan tugas pokok yang diamanatkan, maka fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun **fungsi** Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan seluruh **tugas pokok** dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari



- 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional



BUPATI BENGKALIS,


KASMARNI

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. **Impact** pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (**high level indicators**) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah ***"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera dan unggul di Indonesia"***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Masyarakat.



Melihat dari rumusan visi dan misi di atas, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yaitu :

- a. Salah satu misi yang nantinya akan dituangkan dalam RPJMD adalah Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam memajukan perekonomian, hal ini sejalan dengan strategi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan yaitu melakukan perubahan terhadap pola pikir masyarakat akan pola pangan yang baik dan berkualitas, mampu memenuhi pangan keluarga melalui pemanfaatan perkarangan, memberikan pembinaan, pendampingan dan edukasi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan di dalam Program Bupati Terpilih juga di ikutsertakan kedalam Program Stimulus Ekonomi, Penanganan Stunting dan Program Paud Holistik yang diharapkan kedepannya bisa saling mendukung.
- b. Menyediakan infrastruktur yang berkualitas dibidang pangan baik untuk pangan pokok maupun infrakstruktur pendukung pangan lainnya (pangan lokal) yang mampu menaikkan perekonomian masyarakat.
- c. Menjadi Bagian dari Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang Baik menangani urusan Pangan.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Penstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara Lebih Rinci Sasaran dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target
Renstra Dinas Ketahanan Pangan Periode 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Pangan	Stabilnya Pasokan Pangan Pokok tertentu	Persentase Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan Pokok Tertentu (%)	107	110	112	115	120
		Meningkatnya kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan gizi	Jumlah Desa yang bebas dari ststus rawan pangan dan gizi (Desa)	1	1	1	1	1
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	86	91	91,5	91,75	92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73	75	80	81	82

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam rangka mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki, merupakan Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan tertulis antara pimpinan dengan bawahan atatau antar instansi yang menetapkan target kinerja dan indicator pencapaiannya dalam periode tertentu. Perjanjaian kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengatur, mengukur dan meningkatkan kinerja, baik secara individu maupun lingkup organisasi.

Setelah dilakukan perubahan berdasarkan Pohon kinerja Daerah yang disusun dan ditetapkan Tujuan, sasaran, indikator serta perubahan indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Maka Indikator Kinerja Utama yang menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disepakati dan ditandai tangani oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dengan Bupati Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam mendukung Pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Stabilnya Pasokan Pangan Pokok tertentu	Persentase Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan Pokok Tertentu (%)	17
2.	Meningkatnya kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan gizi	Jumlah Desa yang bebas dari status rawan pangan dan gizi (Desa)	1
3.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	86
4	Meningkatkannya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73
5	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal perangkat daerah (%)	100
6	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko perangkat daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah (Dokumen)	1

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi. Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Pengukuran dengan mambandingakan Target dan realisasi capaian dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reviu Atas Laporan Kinerja Isntansi pemerintah.

1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Stabilnya Pasokan Pangan Tertentu	Persentase Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan Pangan Pokok Tertentu (%)	107	106	99,06%
2.	Meningkatnya Kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan gizi	Jumlah Desa yang bebas dari ststus rawan pangan gizi (Desa)	1	1	100%
3.	Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA).	Skor Pangan Pangan Harapan	86	93,51	108,73%

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73	72,90	99,06%
5.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%	75,33%	75,33%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN I

Stabilnya Pasokan Pangan tertentu

Stabilnya Pasokan Pangan tertentu di suatu wilayah dapat dilihat dari Jumlah ketersediaan Pangan yang memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Peningkatan Ketahanan Pangan daerah dapat dinilai dari Jumlah ketersediaan pangan yang diperoleh dari beberapa item yaitu data produk beras dan data pasokan dari luar kabupaten.



Tabel. 3.1 Capaian Stabilitasnya Pasokan Pangan Tertentu adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
- Persentase Perbandingan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Pangan Tertentu (%)	107	106	99,06%

1. Persentase Perbandingan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan Pangan tertentu

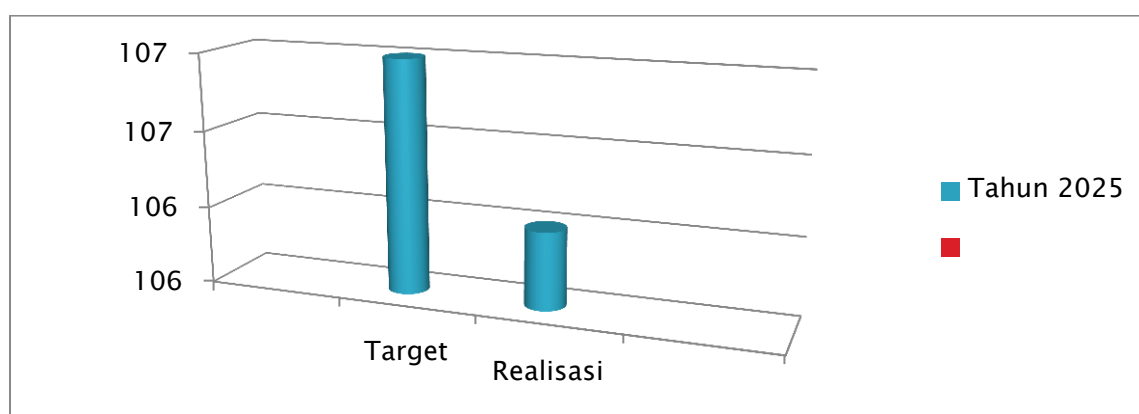
Persentase Perbandingan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan adalah indikator krusial ketahanan pangan yang mengukur kecukupan produksi dan stock pangan dalam suatu wilayah dibandingkan Konsumsi Penduduk. Kondisi ideal tercapai saat ketersediaan Melebihi Kebutuhan (>100%) Menciptakan surplus, sementara ketersediaan (<100%) menunjukkan defisit yang beresiko menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan kelaparan. adapun sumber data Ketersedian dan Kebutuhan pangan Masyarakat di dapat dari Data Neraca Pangan wilayah.

Pada tahun 2025 Target dari Perbandingan Ketersediaan Pangan dengan Kebutuhan tertentu di Kabupaten Bengkalis Adalah 107 % dengan realisasi 106% dan capaian sebesar 99,06%:

- Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan antara lain Produksi, Impor, Konsumsi dan Jumlah Penduduk.

Gambar 3.1

Capaian Stabilitasnya Pasokan Pangan Tertentu



SASARAN 2

Meningkatnya Kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan gizi

salah satunya dengan Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Tabel. 3.2 Capaian Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi Tertentu adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	Capaian Tahun 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
- Meningkatnya Kewaspadaan terhadap kerawanan pangan dan gizi	1	1	100%

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas –FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa/kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan wilayah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi



ketahanan pangan; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data di tingkat desa/kelurahan.

Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; (2) Rasio jumlah prasarana dan sarana penyedia pangan terhadap jumlah kepala keluarga. Indikator pada aspek keterjangkauan pangan adalah (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk; (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah : (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah kepala keluarga; (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga Kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Hasil analisis komposit ketahanan dan kerentanan pangan terhadap 155 desa/kelurahan menempatkan 0 desa pada Prioritas 1 dan Prioritas 2; 1 desa (0,65%) pada Prioritas 3; 8 desa (5,16%) pada Prioritas 4; 20 desa/kelurahan (12,9%) pada Prioritas 5; dan 126 desa/kelurahan (81,29%) pada Prioritas 6. Total desa yang masuk ke dalam Prioritas 1-3 dikategorikan desa rentan terhadap kerawanan pangan berjumlah 1 desa (0,65%). Sedangkan desa yang masuk ke dalam Prioritas 4-6 dikategorikan desa tahan terhadap kerawanan pangan berjumlah 154 desa/kelurahan (99,35%). Desa rentan rawan pangan Prioritas 3 (agak rentan) di Kabupaten Bengkalis adalah Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan.

FSVA Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan situasi ketahanan pangan serta penurunan jumlah desa yang tergolong rentan rawan pangan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Situasi ini terlihat dari berkurangnya jumlah desa rentan (Prioritas 3) yang pada tahun 2023 berjumlah 2 desa menjadi 1 desa pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah desa yang tergolong tahan pangan (Prioritas 4-6) mengalami peningkatan dari 153 desa/kelurahan menjadi 154 desa/kelurahan.

Rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kerentanan pangan wilayah desa rentan rawan pangan antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman
- b. dan pemanfaatan teknologi inovatif untuk meningkatkan produktivitas usaha pertanian pangan;



- a. Intensifikasi lahan pangan melalui pemenuhan sarana prasarana, tumpang
- b. sari dan lainnya;
- c. Pengembangan potensi lahan untuk peningkatan produksi pangan;
- d. Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi karena jenis sawah di Kabupaten Bengkalis merupakan sawah tadah hujan;
- e. Pembangunan pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern karena
- f. masih terbatasnya jumlah pasar yang ada;
- g. Penguatan peran dan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
- h. mendukung peningkatan ketahanan pangan lokal melalui pengelolaan usaha
- i. pangan, distribusi hasil pertanian, dan penyediaan bahan pangan strategis ditingkat desa;
- j. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah dan kegiatan sejenisnya yang lebih intensif untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan kios pangan sebagai sarana dan prasarana penyedia pangan;
- l. Penyaluran bantuan pangan baik bersumber karbohidrat maupun protein kepada rumah tangga berpendapatan rendah dan atau miskin;
- m. Fasilitasi kegiatan UMKM, termasuk usaha olahan pangan untuk menggerakkan ekonomi wilayah dan meningkatkan penyediaan pangan beragam sekaligus meningkatkan prasarana dan sarana penyedia pangan;
- n. Penyediaan lapangan pekerjaan dan pengembangan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menurunkan kemiskinan;
- o. Peningkatan SDM bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah;
- p. Penyaluran bantuan sosial dan jaminan sosial bagi kelompok Masyarakat berpendapatan rendah;
- q. Peningkatan akses penghubung ke desa sehingga dapat dilalui sepanjang tahun;
- r. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis terkait pemerataan akses air minum di masyarakat;
- s. Penguatan kerjasama dengan Labkesmas Tier IV terkait teknologi pengolahan air minum seperti pengolahan air gambut menjadi air jernih;



- t. Penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat;
- u. Dukungan terhadap usaha penyedia air bersih termasuk pengurusan perizinan;
- v. Penambahan tenaga kesehatan dalam rangka pemenuhan tenaga medis minimal 1 dokter di setiap 1 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan pemenuhan pada daerah Prioritas 1 dan 2;
- w. Integrasi perencanaan kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK);
- x. Peningkatan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA);
- y. Sosialisasi dan penyuluhan tentang stunting kepada ibu hamil dan sosialisasi
- z. konsumsi pangan lokal dalam pemenuhan gizi balita serta pola asuh anak.

SASARAN 3

Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

Data yang digunakan dalam penyusunan Direktori ini adalah data Sekunder hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bersumber dari BPS, yang telah diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran. Data dasar Susenas yang digunakan adalah data modul konsumsi dan pengeluaran tahun 2025 triwulan I. Data Susenas tersebut diolah dan dijustifikasi dengan menggunakan **rasio pengeluaran riil** setiap kelompok pangan, yang dikoreksi dengan **Indek Harga Konsumen (IHK)** kelompok pangan nasional tahun 2009 - 2015 (BPS). Pendekatan justifikasi kuesioner dilakukan dengan pertimbangan perubahan jenis dan jumlah komoditas pangan yang disurvei dalam Susenas tahun 2009 - 2015. Mulai tahun 2020 tidak dilakukan justifikasi kuesioner dengan pertimbangan jenis dan jumlah komoditas pangan yang disurvei dalam Susenas sudah makin beragam.

Publikasi ini juga menyajikan perkembangan partisipasi konsumsi, yang merupakan persentase penduduk yang mengonsumsi jenis pangan terhadap total penduduk Kabupaten Bengkalis hasil Susenas tahun 2025. Partisipasi penduduk yang disajikan merupakan angka partisipasi konsumsi pangan (baik segar



maupun olahan, dengan pengelompokkan komoditas pangan Susenas mengikuti pengelompokan komoditas kelompok Pola Pangan Harapan.

Tabel. 3.2 Capaian Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	2025			Kinerja Tahun-Tahun sebelumnya					
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	86	93,51	108,73%	91.75	91.1	92.3	88.4	87.9	87.1

1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)

PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman. Sasaran Skor PPH ideal yaitu 100% sesuai dengan bobotnya masing-masing. Pada Tahun 2024 metode perhitungan menggunakan Data primer dan Tahun 2025 menggunakan Susesnas .

*Skor aktual PPH yang dicapai tahun 2025 adalah 93,51 termasuk dalam **kategori baik**.* Dari angka tersebut terlihat dimana tingkat keberagaman konsumsi dan mutu pangan penduduk Kabupaten Bengkalis mulai beragam bergizi seimbang dan aman. Namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih perlu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perlu keberagaman konsumsi dan mutu pangan keluarga untuk mencapai nilai standar konsumsi yang ideal yaitu 100.

Dari angka tersebut terlihat dimana tingkat keberagaman konsumsi dan mutu pangan penduduk Kabupaten Bengkalis mulai beragam bergizi seimbang dan aman dengan Rincian sbb:



Tabel 2. KELOMPOK PANGAN MENURUT KONSUMSI KALORI, PROTEIN, SKOR PPH TAHUN 2025, SKOR PPH TAHUN 2024 DAN GAP.

		Berat (gram/kap/ hari)	Konsumsi Energi (kkal/kap/ hari)	Konsumsi Protein (gram protein/ kap/hari)	SKOR MAKS	SKOR PPH TAHUN 2025	SKOR PPH TAHUN 2024	GAP
		Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean	Mean
KELOMPOK PANGAN	Padi-padian	252,77	990,03	22,16	25	23,57	25,0	-1,43
	Umbi-umbian	56,44	60,94	,82	2,5	1,45	1,2	0,25
	Pangan Hewani	171,61	302,4	27,87	24	24,00	24,0	0
	Minyak dan Lemak	39,38	353,97	,03	5	5,00	5,0	0
	Buah/Biji Berminyak	8,91	48,25	,54	1	1,00	1,0	0
	Kacang-kacangan	22,47	64,1	5,03	10	6,10	5,2	0,9
	Gula	27,63	99,94	,52	2,5	2,38	1,9	0,48
	Sayur dan Buah	248,78	132,69	4,64	30	30,00	27,0	3
	Lain-lain	54,04	37,07	1,22	0	0,00	0,0	0
		864,50	2.089,37	62,84	100	93,51	90,30	3,2

Skor PPH konsumsi penduduk Kabupaten Bengkalis tahun 2025 mencapai **93,51** (Sesuai yang tertera pada tabel 2 diatas) masih di bawah skor PPH Indonesia **95,1**, namun lebih tinggi dari Skor PPH provinsi Riau yakni, 93,69, sudah melebihi target yang ditetapkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yakni sebesar 90,75. Dari segi kuantitas konsumsi energi Penduduk Kabupaten Bengkalis masih belum cukup, masih dibawah 2100 kkal/kap/hari (2.089,37 kkal/kap/hari). Persentasi Angka Kecukupan Energi masih dibawah 100% (99,94%) dari segi kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bengkalis sudah beragam. Hal ini dapat dilihat dari skor AKE yang kurang dari skor maksimal yaitu terdapat pada kelompok pangan umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula serta sayur dan buah. sedangkan kelompok pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak dapat dikatakan sudah beragam hal ini dapat dilihat dari skor AKE lebih dari skor maksimal.

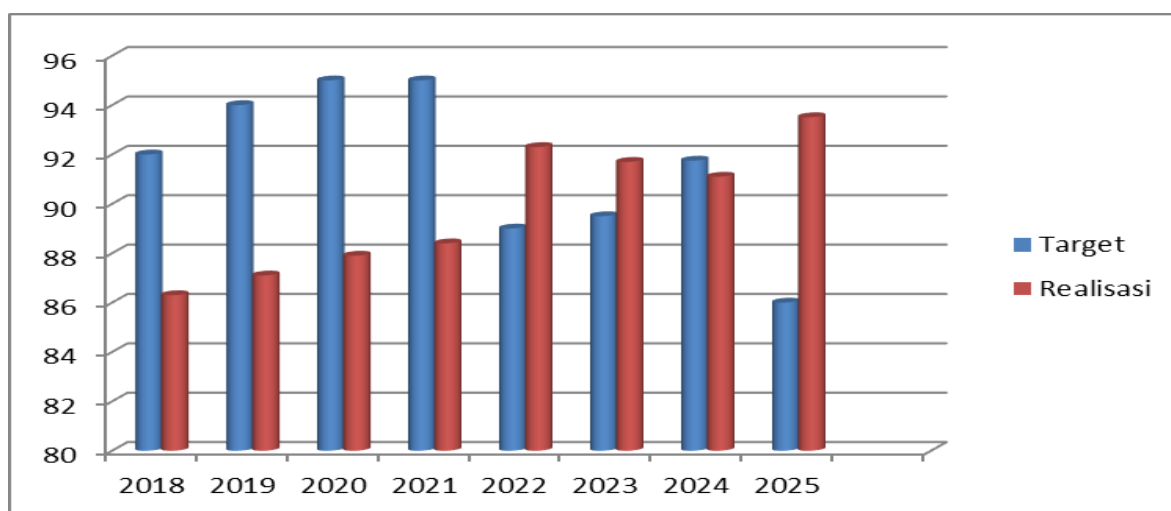
Pola Pangan Harapan (PPH) dapat digunakan sebagai ukuran Keseimbangan gizi dan Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Skor PPH maksimal yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam, baik komposisi maupun mutu gizinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Skor Pola Pangan Harapan diantaranya yaitu besaran keluarga, tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan, ketiga faktor tersebut umumnya berpengaruh positif terhadap Skor Pola Pangan Harapan pada suatu wilayah artinya “Jika porsi besaran keluarga, tingkat pendapatan



dan tingkat pendidikan meningkat maka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga akan meningkat”.

Keterbatasan pendapatan rumah tangga merupakan salah satu penghambat dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan rumah tangga, selain itu guna meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan disuatu wilayah, tingkat Pendidikan di wilayah tersebut harus diperhatikan agar pengetahuan masyarakat di wilayah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan tentang pentingnya pangan bagi kehidupan mereka.

GAMBAR 3.3
Capaian Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)



Keseimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, yang kita kenal dengan istilah **Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)**. PPH merupakan susunan pangan yang benar-benar menjadi harapan baik di tingkat konsumsi maupun ketersediaan, serta dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Dalam PPH, pangan dikelompokkan menjadi 9 kelompok. Setiap kelompok pangan diberi bobot, kriteria dan besarnya bobot pada dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Susunan Pola Pangan Harapan Nasional

No	Kelompok Pangan	% AKG (FAO RAPA)	Pola Pangan Harapan Nasional				
			Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Padi - padian	40.0 – 60.0	289	1050	50.0	0.5	25.0
2.	Umbi-umbian	0.0 – 8.0	105	126	6.0	0.5	2.5
3.	Pangan Hewani	5.0 – 20.0	157	252	12.0	2.0	24.0
4.	Minyak dan Lemak	5.0 – 15.0	21	210	10.0	0.5	5.0
5.	Buah/Biji Berminyak	0.0 – 3.0	11	63	3.0	0.5	1.0
6.	Kacang-kacangan	2.0 – 10.0	37	105	5.0	2.0	10.0
7.	Gula	2.0 – 15.0	31	105	5.0	0.5	2.5
8.	Sayur dan Buah	3.0 – 8.0	262	126	6.0	5.0	30.0
9.	Lain – lain	0.0 – 5.0	-	63	3.0	0.0	0.0
Jumlah				2100	100.0	-	100.0

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tetap menjadi indikator utama yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan dan keberhasilan pembangunan pangan. sebagai indikator strategis, PPH tidak hanya mencerminkan keberhasilan penganeekaragam konsumsi pangan tetapi juga menjadi dasar penting dalam perencanaan dan evaluasi untuk RPJMN 2025-2029, yang akan menetapkan visi dan misi baru bagi pembangunan nasional.

Tabel. 3.4 Capaian Realisasi Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Nasional:

INDIKATOR KINERJA	Tahun				
	2023	2024	2023	2022	2021
Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	95,1	93,5	94,1	92.9	87.2



SASARAN 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Penilaian Akuntabilitas di dapat dari evaluasi Dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat yang melakukan analisis yang sistematis, Pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalaan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Tabel. 3.4

Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	73	72,90	99,06%

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Pedikat SAKIP Dinas Ketahanan Pangan sebesar 99,06% , dengan nilai Pencapaian ini masih tetap ada beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan demi pencapaian Target Kabupaten Bengkalis dengan Nilai BB atau lebih kedepan. Berdasarkan Evaluasi Dokumen SAKIP pada Dinas Ketahanan Pangan beberapa hal yang perlu dilakukan Perbaikan antara Lain:

- Memperhatikan Penjabaran kinerja (Pohon Kinerja/Cascading) dalam Menyusun Perjanjian Kinerja, sehingga Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tidak sama dengan level jabatan dibawahnya .
- Memperhatian capaian kinerja tahun sebelumnya dalam penetapan target kinerja di dalam Perjanjian Kinerja .



- Meningkatkan Pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai, dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mampu merumuskan, menetapkan perencanaan kinerja.
- Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (Pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam mempengaruhi penyesuaian startegi, kebijakan dan aktifitas dalam mencapai kinerja.
- Menggambarkan hubungan kinerja, startegi, kebijakan bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan dalam rencanan aksi atas kinerja.
- Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana aksi.
- Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkagtan kinerja yang dapat dilaksanakan dalam hal evaluasi program.
- Melaksanakan pemantauan rencana aksi atas kinerja dalam rangka mengendalikan kinerja.
- Melaksanakan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi ini sudah ditindaklajuti untuk perbaikan evaluasi akan datang, dan kenaikan nilai sesuai dengan Target yang di tetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

SASARAN 5

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Survei Penilaian Integritas (SPI) Adalah inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur Tingkat integritas serta potensi risiko korupsi di lingkungan kementerian, Lembaga dan Pemeriantah Daerah (K/L/PD). Dengan partisipatif aktif, kita Bersama menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Adapun respoden internal Adalah Pegawai atau aparatur yang



bekerja dilingkungan Kementerian, Lembaga, Maupun Pemerintah Daerah yang di survei.

Tabel. 3.5

Capaian Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%	75,33%	75,33%

untuk akan datang Dinas Ketahanan Pangan berkomitmen untuk terus meningkatkan partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Intergritas (SPI) internal Perangkat Daerah.

SASARAN 6

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko perangkat daerah

Pengelolaan manajemen resiko perangkat daerah Adalah proses sistematis (Identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, pemantauan) untuk mengendalikan risiko atas tujuan strategis (Renstra) dan operasional (Renja/DPA) guna menjamin pencapaian target kerja.

Tabel. 3.6

Capaian Meningkatnya Pengelolaan Manjemen Risiko Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	2025		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Dinas Ketahanan Pangan telah membuat Peta Resiko Perangkat Daerah yang dalam komponen utamanya mengidentifikasi dan Analisis, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Integrasi, Pemantauan dan Pelaporan.



Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program Pendukung
1	2	3	4
1	Stabilnya Pasokan Pangan Tertentu	1. Persentase Perbandingan Ketersediaan dengan Kebutuhan pangan pokok Tertentu	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2.	Meningkatnya Kewaspadaan terhadap Kerawanan Pangan dan Gizi	1. Jumlah Desa yang Bebas dari Status Rawan pangan dan gizi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3.	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 2. Program Pengawasan Keamanan Pangan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Predikat SAKIP Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

C. Realisasi Anggaran

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 yang menjelaskan bahwa dana APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2025 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan



Pangan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku seluruhnya berjumlah Rp.11.059.063.062,- yang terdiri dari Belanja Kegiatan dan Belanja Penyediaan Gaji/Tunjangan , dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Kegiatan : Rp. 4.591.643.066,-
- Belanja Penyediaan Gaji/Tunjangan : Rp. 6.467.419.996,-

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menyusun dan menetapkan program dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kepmendagri nomor 050-85889 Tahun 2021 , dimana dalam tahun anggaran 2024 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 5 program dengan 30 Sub kegiatan.

Adapun rincian realisasi Belanja Langsung yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel.3.5
Rincian Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran	Indikator	Pagu Dana	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stabilnya Pasokan Pangan Tertentu	Pesentase Perbandingan Ketersediaan dengan kebutuhan pokok tertentu	508.170.527	484.416.227	95%
2.	Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap kerawanan pangan dan gizi	Jumlah Desa yang bebas dari status rawan pangan dan gizi	271.236.100	138.146.900	51%



3.	Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	1.882.354.446	1.703.936.138	92%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.929.881.993	1.762.441.337	91,32%

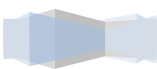
D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Stabilnya Pasokan Pangan Tertentu			
	- Pesentase Perbandingan Ketersediaan dengan kebutuhan pokok tertentu	99,06%	95%	3,06%
2.	Meningkatnya Kewaspadaan Terhadap kerawanan pangan dan gizi			
	- Jumlah Desa yang bebas dari status rawan pangan dan gizi	100%	51%	49%
3.	Meningkatnya Kualitas konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			
	- Nilai Pola Pangan Harapan (PPH)	99,06%	92%	7,06%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
	- Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	100%	91,32%	8,68%



Tingkat Efisiensi didapat dari selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk pencapaian sasaran yang akan dicapai. untuk kegiatan yang akan datang diharapkan makin meningkat program dan kegiatan yang ada dapat sehingga mendukung sasaran dan Capaian Kinerja yang akan dicapai atau ditarget kan.



BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis telah dicapai. Yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja Utama sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis. Namun demikian, untuk tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti kantor dan perlengkapan pendukung kegiatan lainnya baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi yang ada sehingga setiap kegiatan bidang dan bagian dapat berjalan secara dinamis mencapai sasaran yang ditetapkan.
3. Menambah jumlah sumberdaya manusia yang ada, dengan tetap terus melakukan peningkatan SDM yang dimiliki untuk menunjang kelancaran program dan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis mengharapkan agar LAKIP tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas organisasi kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bengkalis, Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BENGKALIS,



SUSY HARTATI, SP.M.Si
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP. 19751217 200604 2 001